

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM KERJA  
PEGAWAI DALAM MASA TATANAN NORMAL  
BARU DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN  
TINGGI (LLDIKT) WILAYAH II**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**Rahmawati Septi Rahayu**

**NIM. 07011181722014**

**Konsenterasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM KERJA PEGAWAI  
DALAM MASA TATANAN NORMAL BARU DI LEMBAGA  
LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH II**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

**RAHMAWATI SEPTI RAHAYU**


**07011181722014**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juni 2021**

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., MM**

**NIP. 195811191985031003**




---

**Pembimbing II**

**Dwi Mirani, S.IP., MSi**

**NIP. 198106082008122002**



---

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM  
MASA TATANAN NORMAL BARU DI LEMBAGA LAYANAN  
PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH II**

**SKRIPSI**

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada tanggal 09 Juni 2021

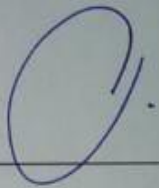
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

**Tim Penguji Skripsi**

Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM.

NIP. 195811191985031003

Ketua

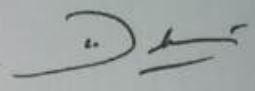


---

Dwi Mirani, S.IP., M.Si

NIP. 198106082008122002

Anggota



---

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.

NIP. 196511171990031004

Anggota

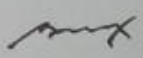


---

Drs. Mardianto., M.Si

NIP. 196211251989121001

Anggota

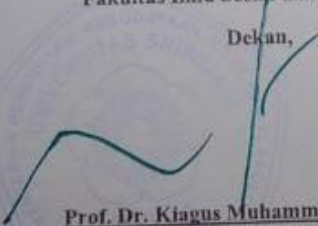


---

Palembang, Juni 2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,



---

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.

NIP. 196311061990031001

## LEMBAR PERSEMBAHAN

**Motto:**

*“Be good to others as Allah has been good to you”*

[Q.S Al Qasas : 77]

**Atas Rahmat Allah Subhanallahu Wa Ta’ala,**

**Saya Persembahkan Skripsi ini Kepada :**

- 1. Diri saya sendiri yang telah mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi**
- 2. Kedua orang tua saya, Bapak Suharsono dan Ibu Wanaziro yang selalu memberikan saya dukungan dan doa**
- 3. Dosen Pembimbing Skripsi saya yaitu Bapak Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., MM dan Ibu Dwi Mirani, S.IP., MSi**
- 4. Teman-teman Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017 yang telah kebersamai dalam seluruh perkuliahan berlangsung**
- 5. Almamater Universitas Sriwijaya**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Pegawai Dalam Masa Tatanan Normal Baru Di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Pegawai Dalam Masa Tatanan Normal Baru di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Pegawai Dalam Masa Tatanan Normal Baru di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II menggunakan metode kualitatif. Sumber data sendiri didapatkan melalui data primer dan data sekunder, untuk teknik pengumpulan data didapatkan melalui observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Penelitian ini merujuk dari teori implementasi kebijakan model Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan yang dilihat dari tiga variabel yaitu tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, serta terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki Implementasi. Hasil dari penelitian Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Pegawai Dalam Masa Tatanan Normal Baru di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II menunjukkan belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih terdapatnya beberapa hambatan, tetapi tidak menghambat pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Pegawai, Implementor, LLDIKTI Wilayah II

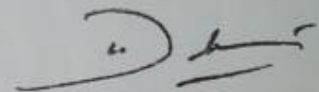
Pembimbing I



Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., MM

NIP. 195811191985031003

Pembimbing II



Dwi Mirani, S.IP., MSi

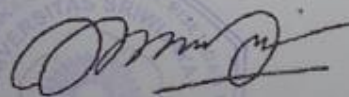
NIP. 198106082008122002

Palembang, Juni 2021

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya,



Zailani Surva Marpaung, S.Sos, MPA

NIP. 198108272009121002

## ABSTRACT

This research is entitled Implementation of Employee Work System Policy in the New Normal Order Period at the Higher Education Service Institution (HESI) Region II. This study aims to explain the implementation of the Employee Work System Policy in the New Normal Order Period at Region II Higher Education Service Institutions. The research method used in the study of Employee Work System Policy Implementation in the New Normal Order Period at Region II Higher Education Service Institutions using qualitative methods. The data source itself is obtained through primary data and secondary data, for data collection techniques obtained through observation, direct interviews, and documentation. Uni research refers to the policy implementation theory of Randall B. Ripley and Grace A. Franklin's model to measure the success of policy implementation seen from three variables, namely the level of compliance with applicable regulations, the smooth implementation of routine functions, and the realization of the desired performance and impact. The results of the research on Employee Work System Policy Implementation in the New Normal Order Period at Region II Higher Education Service Institutions show that it is not yet fully optimal because there are still several obstacles, but it does not hinder the implementation of the policy as a whole.

*Keywords: Employee Work System Policy Implementation, Implementer, HSEI Region II*

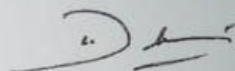
Advisor I



Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., MM

NIP. 195811191985031003

Advisor II



Dwi Mirani, S.I.P., MSi

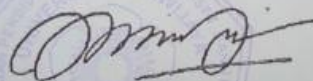
NIP. 198106082008122002

Palembang, Juni 2021

Head of Public Administration Departement

Faculty of Social and Political Sciences

Sriwijaya University,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA

NIP. 198108272009121002

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wata’ala atas selesainya penulisan Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Pegawai Dalam Masa Tatanan Normal Baru Di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II” pada tepat waktu. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan agar penulis dapat menyempurnakan Skripsi ini dengan baik dan dapat membuat Skripsi yang lebih baik lagi kedepannya. Penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan Skripsi ini, mulai dari awal penulisan, menemukan data, sampai selesainya Skripsi ini. Penulis mendapatkan banyak bantuan, saran, petunjuk, dan bimbingan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan FISIP UNSRI.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Publik.
5. Bapak Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., MM dan Ibu Dwi Mirani, S.IP., MSi selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan saya banyak masukan, nasihat, serta saran yang sangat bermanfaat dalam perkuliahan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta para staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang sudah memberi pelajaran berharga serta membantu selama ini.
7. Bapak/Ibu serta Mba/Kakak seluruh pegawai LLDIKTI Wilayah II yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya, namun telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, pengalaman dan nasihat yang luar biasa selama penelitian dan pengambilan data berlangsung.
8. Sahabat saya yang memberikan dukungan dan semangat yaitu Adelcecep, Hannysetia, dan Dugongku yang setia membantu penulisan skripsi ini.
9. Teman terdekat kuliah saya yang tidak bisa saya sebutkan karna semuanya memberikan saya banyak kebaikan dan banyak manfaat.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Administrasi Publik dan almamater saya.
11. Band Day6 khususnya kepada Park Sungjin, Park Jaehyung, Kang Younghyun, Kim Wonpil, dan Yoon Dowoon karena musik kalian memberikan saya banyak rasa semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, berkah, karunia, rahmat, serta rezeki-Nya atas semua kebaikan dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih banyak.

Palembang, Juni 2021

Penulis

(Rahmawati Septi Rahayu)

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Landasan Teori .....	11
B. Kebijakan Publik.....	11
C. Implementasi Kebijakan Publik.....	12
D. Teori-Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	13
1. Implementasi Kebijakan Model Donald van Metter & Carl Van Horn .....	13
2. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III.....	15
3. Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle.....	18
4. Implementasi Kebijakan Model Thomas R. Dye .....	20
5. Implementasi Kebijakan Model Charles O. Jones.....	20
6. Implementasi Kebijakan Model Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin .	21
E. Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian .....	22
F. Kerangka Teori.....	24
G. Penelitian Terdahulu.....	26
H. Kerangka Pemikiran .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>



A.	Jenis Penelitian .....	31
B.	Definisi Konsep .....	31
C.	Fokus Penelitian.....	33
D.	Data dan Sumber Data .....	34
E.	Informan Penelitian.....	35
F.	Unit Analisis.....	35
G.	Teknik Pengumpulan Data .....	35
H.	Analisis Data.....	36
I.	Sistematika Penulisan.....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>39</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
	1. Sejarah Singkat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II .....	39
	2. Visi dan Misi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II.....	41
	3. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II.....	41
	4. Susunan Struktur Organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II.....	43
	5. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bidang Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II .....	45
B.	Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Pegawai Dalam Masa Tatanan Normal Baru di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II.....	46
	1. Analisis Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang Berlaku .....	47
	2. Analisis Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi .....	53
	3. Analisis Terwujudnya Kinerja dan Dampak Yang Dikehendaki .....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>69</b>
A.	Kesimpulan .....	69
B.	Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel</b>	
Tabel 1. Absensi Kehadiran Pegawai LLDIKTI Wilayah II Bulan Juni-Desember 2020 ..	7
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3. Fokus Penelitian .....	33
Tabel 4. Absensi Kehadiran Pegawai LLDIKTI Wilayah II Bulan Januari-Maret 2021 ..	66

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar</b>	
Gambar 1. Jumlah Konfirmasi Positif dan Konfirmasi Baru di Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 1 Juni – 15 Desember 2020 .....	2
Gambar 2. Aplikasi Pengisian Absen Online (Pegawai LLDIKTI Wilayah II) .....	6
Gambar 3. Ilustrasi Kaji Dalam Model Implementasi Ripley dan Franklin.....	21
Gambar 4. Kerangka Pemikiran .....	30
Gambar 5. Susunan Organisasi LLDIKTI Wilayah II.....	44
Gambar 6. Sasaran Kinerja Pegawai LLDIKTI Wilayah II .....	48
Gambar 7. Pegawai LLDIKTI Wilayah II Melakukan Tugas, Pokok, dan Fungsi Dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan.....	50
Gambar 8. Pelayanan Unit Layanan Khusus (ULT) Dilakukan Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan.....	51
Gambar 9. Fasilitas Sarana dan Prasarana Protokol Kesehatan LLDIKTI Wilayah II .....	52
Gambar 10. Pegawai LLDIKTI Wilayah II Mengerjakan Laporan Kinerja Melalui Website Aplikasi Online.....	54
Gambar 11. Lembar Disposisi dan Surat Keputusan LLDIKTI Wilayah II.....	55
Gambar 12. Aplikasi E-SKP (Sistem Kinerja Pegawai).....	56
Gambar 13. Himbauan Pelayanan ULT Maksimal 15 Menit Dengan Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan.....	57
Gambar 14. Jadwal Kehadiran Pegawai LLDIKTI Wilayah II Periode Januari 2021 .....	59
Gambar 15. Rekam Kehadiran Secara Fisik di Kantor LLDIKTI Wilayah II .....	60
Gambar 16. Ketidakhadiran Kepala Sub Bagian Sehingga Tidak Dapat Meminta Tanda Tangan Kelanjutan Disposisi Surat .....	61
Gambar 17. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Semester 1 Tahun 2020 .....	62
Gambar 18. Sosialisasi Pengembangan Aplikasi SiKito .....	64
Gambar 19. Surat Edaran Absensi Pegawai Selama Tatanan Normal Baru .....	65
Gambar 20. Para Pegawai LLDIKTI Tetap Disiplin .....	67
dan Mematuhi Protokol Kesehatan .....	

## DAFTAR SINGKATAN

WHO	: <i>World Health Organization</i>
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>
ASN	: Aparatur Sipil Negara
MENPANRB	: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
LLDIKTI Wilayah II	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II
TUPOKSI	: Tugas, Fungsi, dan Pokok

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

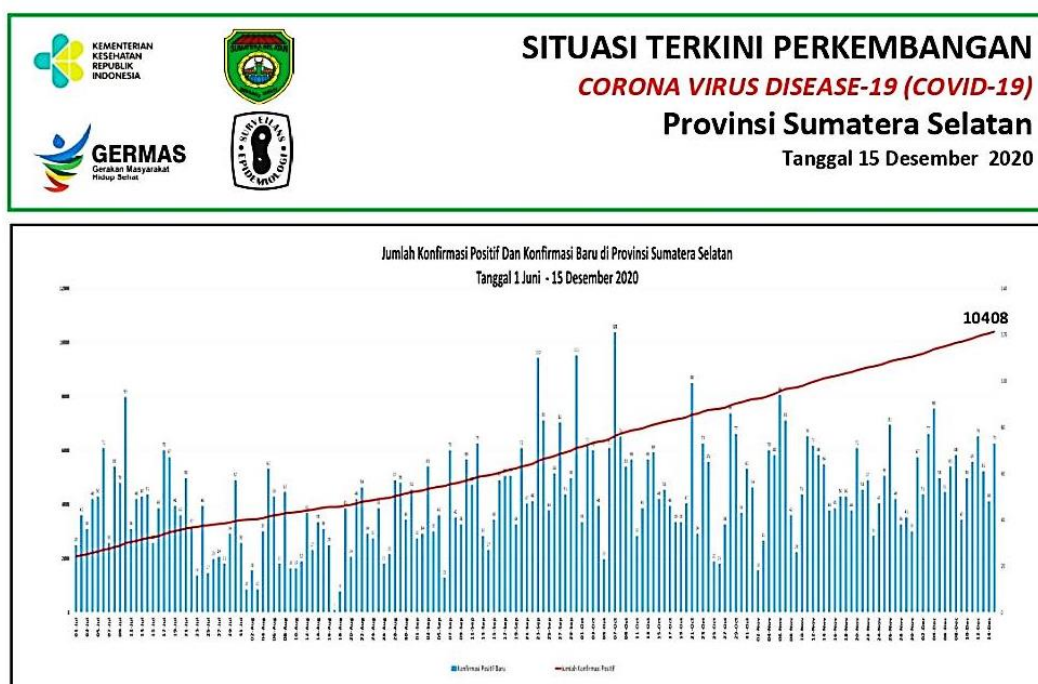
Mengawali tahun 2020, seluruh belahan dunia dikabarkan adanya kasus baru yaitu dengan mewabahnya pneumonia baru yang menyebar dengan cepat di berbagai dunia termasuk Indonesia. Informasi kasus ini berawal dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) yang mengumumkan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan kabar terdapatnya kasus kluster pneumonia yang terjadi tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. WHO mengumumkan pada tanggal 11 Februari 2020 nama virus yaitu *Severa Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) atau *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), dimana terjadinya penyebaran transmisi virus ini tidak dapat ditentukan, apakah terjadi sesama antar manusia atau melalui hewan. Peningkatan pada jumlah kasus yang tentunya terus-menerus bertambah dengan berjalannya waktu, hingga dikonfirmasi transmisi pneumonia terjadi secara menular dari manusia ke manusia (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020).

Kasus yang terus meningkat setelah mendapatkan informasi bahwa penyebab pneumonia ini *novel coronavirus*, hal ini dikarenakan terdapatnya laporan kematian yang menyebar di luar China (dinkes.sulbarprov.go.id, 2020). WHO telah menetapkan COVID-19 tersebut sebagai pandemi yang berskala global pada tanggal 11 Maret 2020. Penetapan ini berdasarkan pada tersebarnya 118 ribu kasus yang menyebar sebanyak 114 negara. Gejala COVID-19 ini sangat mirip dengan gejala flu disertai pneumonia (radang paru), yang menyebabkan pasien menjadi sesak atau sulit bernafas. Hal inilah yang mengakibatkan meningkatnya angka kematian akibat virus ini (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020). Penyebaran kasus COVID-19 di dunia masih terus terjadi

hingga hari ini, bahkan mengalami lonjakan. Melalui Worldometertotal kasus COVID-19 seluruh dunia hingga 15 Desember 2020 mencapai 73.790.806 kasus.

Peningkatan kasus harian COVID-19 yang terjadi di Indonesia distribusi COVID-19 yang mengjangkau hampir seluruh provinsi di Indonesia dan jumlah kasus serta kematian yang terus bertambah, hal ini dampak pada seluruh aspek masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia membuat keputusan dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Hingga sampai waktu ini, kasus positif baru COVID-19 khususnya pada Provinsi Sumatera Selatan terus kian bertambah. Dikonfirmasi melalui [corona.sumselprov.go.id](http://corona.sumselprov.go.id), Sumatera Selatan hingga pada tanggal 15 Desember 2020 saat ini kasus terkonfirmasi sebanyak 10.408 orang yang positif, sementara orang yang sembuh terdapat 8.648 orang dan orang yang meninggal sebanyak 564 jiwa, serta sampel yang diperiksa laboratorium dari Provinsi Sumatera Selatan terdapat sekitar 44.431 orang (5,19 perseribu penduduk).

**Gambar 1. Jumlah Konfirmasi Positif dan Konfirmasi Baru di Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 1 Juni – 15 Desember 2020**



Sumber: Website Corona.sumselprov.go.id, 2020

Penyebaran penyakit COVID-19 ini memberikan banyak dampak, salah satunya pada sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan status darurat akibat wabah penyakit COVID-19 di Indonesia, memaksa perubahan sistem kerja khususnya pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah memperhitungkan untuk tidak memberlakukan *lockdown*, namun membatasi aktivitas sosial dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Perubahan sistem kerja pegawai di tengah upaya menanggulangi COVID-19, memerlukan akselerasi implementasi kerangka berpikir baru yg dikenal menjadi *new normal* atau tatanan normal baru (beritasatu.com, 2020).

Pemerintah dalam menerapkan tatanan normal baru khususnya dalam lingkup ASN supaya terus aktif serta aman dari penyebaran COVID-19 juga menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) ASN pada tatanan normal baru dilakukan menggunakan memprioritaskan aspek kesehatan & keselamatan bagi ASN, dalam memberikan pelayanan publik dengan menggunakan cara menjalankan protokol kesehatan dalam kegiatan keseharian. Penerapan dalam mengadaptasikan kebiasaan baru pada masa tatanan normal baru pada lingkungan kementerian/lembaga/daerah memerlukan penyesuaian sistem kerja pegawai, dukungan dari sumber daya manusia, dan dukungan dari infrastruktur dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan (Setkab.go.id, 2020).

Memasuki masa tatanan normal baru, di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo membuat aturan spesifik terkait sistem kerja pegawai ASN dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Tatanan Normal Baru. Dengan diterbitkannya aturan sistem kerja ASN tersebut, pemerintah memastikan dalam tupoksi kementerian, daerah maupun lembaga diharapkan berjalan dengan baik. Surat

edaran tersebut mengungkapkan tentang penyesuaian sistem kerja bagi ASN agar bisa beradaptasi dengan baik meski terdapatnya aturan tatanan normal baru, hal ini diharapkan supaya tetap aktif dalam penyesuaian sistem kerja dengan memperhatikan protokol kesehatan (menpan.go.id, 2020).

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II merupakan lembaga yang memberikan pelayanan kepada perguruan tinggi yang termasuk dalam bagian di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam merealisasikan tugas dan fungsinya, LLDIKTI Wilayah II sebagai institusi yang prima dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi, pelayanan kepada kampus maupun terhadap stakeholders, kemudian melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi, dan pengendalian dalam pengarahan berjalannya proses pembelajaran serta melakukan pembinaan terhadap perguruan tinggi di wilayahnya (lldikti2.id, 2020).

Merumuskan suatu kebijakan publik bukan perkara yang mudah khususnya di masa mewabahnya COVID-19 ini dikarenakan tentunya memerlukan banyak perubahan di kehidupan kerja, khususnya pemerintah sehingga mengakibatkan terjadinya reformasi birokrasi. Birokrat sebagai implementor kerap dihadapkan pada berbagai faktor yang mempengaruhi dalam proses perumusan kebijakan, terutama dalam menghadapi era tatanan normal baru untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Perubahan tata kelola birokrasi akibat COVID-19 tentu harus mengedepankan pelayanan publik yang optimal. Penerapan tatanan normal baru adalah salah satu langkah bagi pemerintah dalam membuka seluruh kegiatan serta aktivitas yang terganggu akibat COVID-19.

Perubahan tata kelola birokrasi LLDIKTI Wilayah II memasuki tatanan normal baru, dilakukan dengan perubahan perspektif sistem kerja pegawai, tentunya memperhatikan



pelaksanaan transformasi dalam membuat strategi penyelenggaraan pelayanan publik khususnya tatanan normal baru yang diterapkan. Salah satunya dengan memberlakukan penyederhanaan tataran operasional prosedur (SOP) dan proses pelayanan terhadap perguruan tinggi. Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tanggal, 4 Juni 2020 perihal Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru, LLDIKTI Wilayah II menerbitkan Surat Edaran Standar Operasi Prosedur (SOP) Sistem Kerja Pegawai Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Dalam Tatanan Normal Baru yang diterbitkan pada 9 Juni 2020 dengan Nomor 14/LL2/KP/2020 dengan 10 poin agar dalam melakukan pelayanan terhadap perguruan tinggi berdasarkan protokol kesehatan.

Implementasi kebijakan sistem kerja pegawai di LLDIKTI Wilayah II, dalam menentukan kesuksesan suatu kebijakan, ada pada langkah pengimplementasian pada lapangan yaitu di LLDIKTI Wilayah II, hal ini memberikan fakta bahwa sebuah implementasi yang berjalan dengan baik akan memberikan hasil kinerja dari kebijakan yang baik. Meskipun suatu kebijakan telah menjalani formulasi secara sempurna, namun apabila implementasi tidak berjalan dengan baik, kebijakan ini terbilang belum sepenuhnya memberikan dampak untuk implementor. Oleh karena itulah, kinerja implementasi kebijakan sistem kerja pegawai perlu diperhatikan, hal ini dikarenakan merupakan suatu langkah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Kinerja implementasi kebijakan sistem kerja pegawai diharapkan menentukan arah perubahan kebijakan menjadi terlaksananya kebijakan yang lebih baik dan para implementor menjadi lebih disiplin dalam melaksanakan kebijakan. Kriswibowo, dkk (2017) (dalam Intiah, dkk 2018:170) beropini bahwa kinerja perlu selalu dinilai secara

berkala untuk menjadi bahan masukan (input) untuk suatu kebijakan yang akan datang. Akhir dari tujuan melalui proses evaluasi ialah menaruh masukan bagi proses kebijakan ke depan.

Salah satu poin menarik untuk melihat kinerja implementasi kebijakan dapat dilihat dari Surat Edaran Standar Operasi Prosedur (SOP) Sistem Kerja Pegawai Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Dalam Tatanan Normal Baru, ialah peraturan dimana pegawai LLDIKTI Wilayah II melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan sistem elektronik, pengisian daftar hadir melalui aplikasi absen *online* dengan mematuhi jam kerja dimulai dari pukul 07.30 WIB untuk jam masuk dan pukul 16.00 WIB untuk jam pulang, hal ini dilakukan untuk pencegahan COVID-19 yang biasanya melakukan pengisian absen elektronik *fingerprint*. Landasan dasar dari peraturan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan pada Pasal 12 Ayat 3 yang menjelaskan mengenai komponen kehadiran kerja pegawai.

**Gambar 2. Aplikasi Pengisian Absen Online (Pegawai LLDIKTI Wilayah II)**

No	Hari	Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang
1	Wed	2020-08-26	07:02:50	
2	Tue	2020-08-25	07:08:38	16:15:18
3	Mon	2020-08-24	07:19:37	19:10:02
4	Tue	2020-08-18		
5	Wed	2020-08-19	07:03:57	17:27:00
6	Fri	2020-08-14	07:00:29	16:14:18
7	Thu	2020-08-13	07:04:35	17:40:24
8	Wed	2020-08-12	07:07:32	16:49:20
9	Tue	2020-08-11	07:14:21	17:10:31
10	Mon	2020-08-10	06:56:13	17:51:20

Sumber: Dokumentasi Pra Penelitian diambil di LLDIKTI Wilayah II Tanggal 26 Agustus Tahun 2020

Penetapan ini juga bersamaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo yang kembali menyesuaikan jam kerja bagi aparatur sipil negara. Tjahjo Kumolo kembali mengatur sistem kerja ASN dalam tatanan normal baru. Sistem kerja baru bagi ASN tersebut itu diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 67 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Berdasarkan data yang diperoleh langsung melalui LLDIKTI Wilayah II, adapun absensi kehadiran pegawai LLDIKTI Wilayah II sebagai berikut:

**Tabel 1. Absensi Kehadiran Pegawai LLDIKTI Wilayah II Bulan Juni-Desember 2020**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>Hadir Tepat Waktu</b>	<b>Terlambat Hadir</b>
<b>1.</b>	<b>Juni</b>	<b>53 orang</b>	<b>53 orang</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Juli</b>	<b>51 orang</b>	<b>51 orang</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Agustus</b>	<b>51 orang</b>	<b>32 orang</b>	<b>19 orang</b>
<b>4.</b>	<b>September</b>	<b>51 orang</b>	<b>36 orang</b>	<b>15 orang</b>
<b>5.</b>	<b>Oktober</b>	<b>51 orang</b>	<b>41 orang</b>	<b>10 orang</b>
<b>6.</b>	<b>November</b>	<b>51 orang</b>	<b>39 orang</b>	<b>12 orang</b>
<b>7.</b>	<b>Desember</b>	<b>51 orang</b>	<b>35 orang</b>	<b>16 orang</b>

Sumber: Dokumen dari LLDIKTI Wilayah II, 2021

Berdasarkan data absensi kehadiran pegawai LLDIKTI Wilayah II periode Bulan Juni sampai Desember 2020, terdapat masih banyaknya pegawai yang terlambat hadir absensi

saat memasuki bulan agustus hingga bulan desember, sehingga hal ini menjadi permasalahan karena ketidaksiplinan pegawai LLDIKTI Wilayah II tentunya akan mempengaruhi kinerja kebijakan implementasi sistem kerja pegawai. Surat edaran yang diterbitkan pada 9 Juni 2020 dengan Nomor 14/LL2/KP/2020 dengan menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tanggal, 4 Juni 2020 perihal Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tata Normal Baru khususnya pada aturan pegawai LLDIKTI Wilayah II melakukan rekam kehadiran sistem elektronik diharapkan lebih efisien dan efektif untuk mengurangi pencegahan penularan COVID-19 yang sebelumnya melakukan rekam kehadiran melalui absen *fingerprint*.

Kinerja implementasi kebijakan sistem kerja pegawai pada kenyataannya yang terjadi tidak sesuai yang diharapkan, para pegawai LLDIKTI Wilayah II menjadi tidak disiplin, misalnya, para pegawai memberikan beberapa alasan seperti memiliki anak yang masih kecil sehingga harus mengurus rumah tangga terlebih dahulu, kemudian jarak rumah yang jauh jaraknya dengan kantor. Hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara pra penelitian pun yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Umum, Bapak Fansyuri:

“Berdasarkan evaluasi kami beberapa tahun terakhir, kami berikan waktu satu jam sesuai surat edaran kebijakan ini ternyata tidak efektif. Karena mereka setelah diberikan kebijakan baru, kebiasaan setiap harinya absen pagi bukan pukul 07.30 melainkan 08.30, sekarang diberikan toleransi malah menjadikan kebiasaan. Toleransi ini diberikan apabila kasusnya penting, tidak menjadi dasar sebagai alasan klise untuk absen 08.30. Akhirnya kami mengambil kebijakan itulah tidak ada toleransi saat datang maupun pulang jam kerja. Ketika pegawai memberikan alasan keterlambatan karena jarak rumah yang jauh dari kantor, saya katakan untuk berangkat kerja lebih pagi agar tidak terlambat. Maka dari itu, saya menyuruh mereka untuk merubah pola kebiasaan yang buruk. Jadi tidak ada alasan. Itulah yang membuat para pegawai kalah diplomasi. Dengan alasan seperti itu, kami melakukan evaluasi dan membuat kebijakan tersebut bahwa 07.30 harus sudah ada di kantor. Itu yang membuat dasar kebijakan sebagai bentuk kedisiplinan pegawai. Sedangkan kami para pejabat LLDIKTI Wilayah II dituntut untuk disiplin dalam memberikan contoh yang baik bagi para pegawai. Maka dari itu dibuatlah aturan, tetapi, yang jadi masalah, dikarenakan absen *online*, terkadang para pegawai mengabsen dari rumah bukan ketika tiba di kantor, ketika mereka tiba di kantor biasanya pukul 09.00.

Sebelumnya kami membuat aturan absen melalui *fingerprint*, jadi mereka datang harus tepat waktu, namun karna absen melalui *online* masih saja ada yang terlambat.” (Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Fansyuri, Kepala Bagian Umum, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Senin, 21 Desember 2020)

Reformasi birokrasi LLDIKTI Wilayah II diarahkan pada perubahan kondisi pola hidup tatanan normal baru di era COVID-19, hal ini diharapkan sebuah contoh perubahan birokrasi yg bisa menjawab tantangan yang ada. Diharapkan dengan diimplementasikannya Surat Edaran Standar Operasi Prosedur (SOP) Sistem Kerja Pegawai LLDIKTI Wilayah II Dalam Tatanan Normal Baru, dapat menerapkan adaptasi kebiasaan baru dan penerapan pola baru khususnya pada perubahan perilaku dan budaya pegawai namun, para pegawai LLDIKTI Wilayah II harus untuk disiplin khususnya dalam kehadiran kerja serta tetap inovatif serta inovatif dalam menyesuaikan diri, sehingga dapat memaksimalkan dalam memberikan pelayanan publik.

Kenyataan tersebut berdasarkan data tabel dan hasil wawancara menunjukkan semenjak pandemi COVID-19, tingkat kinerja pegawai LLDIKTI Wilayah II dalam mengimplementasikan kebijakan sistem kerja pegawai tidak tercapai, padahal, dengan menyederhanakan sistem kerja pegawai LLDIKTI Wilayah II, diperlukan implementasi pelayanan publik yang utama dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan mengingat situasi COVID-19 di masa tatanan normal baru dengan tetap menaati protokol kesehatan. Dengan demikian, perlu diteliti bagaimana implementasi kebijakan sistem kerja pegawai di LLDIKTI Wilayah II. Guna mengetahui hasil kinerja implementasi kebijakan sistem kerja pegawai di masa tatanan normal baru di LLDIKTI Wilayah II, sehingga penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Pegawai Dalam Masa Tatanan Normal Baru di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pemaparan permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Pegawai Dalam Masa Tatanan Normal Baru di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk menjelaskan Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Pegawai Dalam Masa Tatanan Normal Baru di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau pembelajaran lebih lanjut dalam melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi dalam perkembangan Ilmu Administrasi Publik di Indonesia dan sebagai bahan kajian mahasiswa/i Ilmu Administrasi Publik

### **2. Manfaat Praktis**

Pembahasan atas permasalahan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi LLDIKTI Wilayah II, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, serta untuk melihat implementasi kebijakan sistem kerja pegawai dalam tatanan normal baru di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dwiyanto, dkk. 2017. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haryatmoko. 2013. *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Moleong, J. Lexy. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2003. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia Jakarta.
- Setiyono, Budi. 2016. *Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Sugiyono. 2017. *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.
- Tahir Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
- Universitas Sriwijaya. 2020. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Palembang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Palembang.
- Winarno, Budi. 2014. *Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

### Jurnal

- Alfatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Unpad Press. Diakses pada 08 Agustus 2020 (Online).
- Heryana, Ade. 2018. *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Diakses pada 7 Oktober 2020 (Online).

- Ibrahim Akhmadrandy. 2016. *Analisis Implementasi Manajemen Kualitas Dari Kinerja Operasional Pada Industri Ekstraktif di Sulawesi Selatan*. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Sam Ratulangi Manado. Diakses pada 15 Januari 2021 (Online).
- Masriani. 2017. *Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis di Kecamatan Mandau)*. Diakses pada 7 Oktober 2020 (Online).
- Maulidya dan Meilani. 2013. *Efektivitas Implementasi SOP Pelayanan Publik*. Pekanbaru: FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya. Diakses pada 15 Januari 2021 (Online).
- Muspawi Mohamad. 2018. *Implementasi Prosedur Kerja Pengawas PAI Sekolah Dasar di Kabupaten Sarolangun*. Jambi: FKIP Universitas Jambi. Diakses pada 15 Januari 2021 (Online).
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. 2020. *Pneumonia COVID-19 Diagnosis & Penatalaksanaan di Indonesia*. Diakses pada 7 Oktober 2020 (Online).

### **Skripsi**

- Khairunnas. 2017. *Implementasi Program Kuliah Gratis Sumatera Selatan di Universitas Sriwijaya Tahun 2015*. Indralaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Rosmalia, Septi. 2015. *Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Studi Kasus Wilayah Laut Marunda Jakarta Utara)*. Diakses pada 7 Oktober 2020 (Online).
- Febrina Veronika Saragih. 2018. *Kajian Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 di Bandar Lampung*. Diakses pada 09 Agustus 2020 (Online).

### **Internet**

- Website Beritasatu.com. 2020. Menteri PAN dan RB Ungkap Implementasi Normal Baru dalam Sistem Kerja ASN, (Online), (<https://www.beritasatu.com/jaja-suteja/nasional/638263/menteri-pan-dan-rb-ungkap-implementasi-normal-baru-dalam-sistem-kerja-asn>, diakses pada 25 September 2020).
- Website Bnpb-inacovid19. 2020. Statistik Corona Seluruh Indonesia, (Online), (<https://datastudio.google.com/u/0/reporting/fda876a7-3eb2-4080-92e8-679c93d6d1bd/page/7ApVB>, diakses pada 15 Desember 2020).
- Website Corona Sumsel Prov. 2020. Situasi COVID-19 Sumsel 15 Desember 2020, (Online),



([http://corona.sumselprov.go.id/userfiles/161220200758\\_Situasi\\_Covid\\_Sumsel\\_15\\_Des\\_2020.pdf](http://corona.sumselprov.go.id/userfiles/161220200758_Situasi_Covid_Sumsel_15_Des_2020.pdf), diakses pada 15 Desember 2020).

Website Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. 2020. Kesiapsiagaan Menghadapi Novel Coronavirus (2019-nCoV) di Prov. Sulawesi Barat, (Online), (<https://dinkes.sulbarprov.go.id/kesiapsiagaan-menghadapi-novel-coronavirus-2019-ncov-di-prov-sulawesi-barat/>, diakses pada 25 September 2020).

Website Idntimes. 2020. [LINIMASA-4] Perkembangan Terkini Pandemi COVID-19 di Indonesia, (Online), (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/linimasa-4-perkembangan-terkini-pandemik-covid-19-di-indonesia/3>, diakses pada 25 September 2020).

Website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2020. Sistem Kerja Tatanan Normal Baru Bagi ASN, Menyesuaikan Status PSBB, (Online), (<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/sistem-kerja-tatanan-normal-baru-bagi-asn-menyesuaikan-status-psbb>, diakses pada 25 September 2020).

Website Kompas. 2020. 3 Faktor Pemicu Meningkatnya Kasus Covid-19 di Kluster Perkantoran, (Online), (<https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/27/133000923/3-faktor-pemicu-meningkatnya-kasus-covid-19-di-kluster-perkantoran?page=all>, diakses pada 15 Desember 2020).

Website Kompas. 2020. Sistem Kerja ASN Kembali Diatur sesuai Zonasi Risiko Covid, (Online), (<https://money.kompas.com/read/2020/09/07/203852126/sistem-kerja-asn-kembali-diatur-sesuai-zonasi-risiko-covid>, diakses pada 15 Desember 2020).

Website LinovHR. 2020. Strategi Penyesuaian Jadwal Kerja Selama Pandemi COVID-19, (Online), (<https://www.linovhr.com/penyesuaian-jadwal-kerja-dalam-pandemi-covid19/>, diakses pada 15 Desember 2020).

Website LLDIKTI Wilayah II. 2014. Profil, (Online), (<http://www.lldikti2.id/page/detail/>, diakses pada 25 September 2020).

Website Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. 2020. Menteri PANRB Terbitkan SE Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru, (Online), (<https://setkab.go.id/menteri-panrb-terbitkan-se-nomor-58-tahun-2020-tentang-sistem-kerja-pegawai-asn-dalam-tatanan-normal-baru/>, diakses pada 25 September 2020).

Website Worldometer. 2020. *Coronavirus Worldwide Graphs*, (Online), (<https://www.worldometers.info/coronavirus/worldwide-graphs/>, diakses pada 15 Desember 2020).

## **Undang-Undang dan Peraturan**

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Surat Edaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Nomor 14/LL2/KP/2020 Tentang Standar Operasi Prosedur (SOP) Sistem Kerja Pegawai Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Dalam Tatanan Normal Baru.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Tatanan Normal Baru.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru.

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru.